



HULONDALO

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI

Available online <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/index>

Kebangkitan Pekerjaan Platform dalam Industri Komunikasi di Indonesia: Memahami Ekosistemnya

The Rise of Platform Work in the Communication Industry in Indonesia: Understanding the Ecosystem

Algooth Putranto¹, Celixa Amenity Yovanka², Arsa Widitiarsa Utoyo³

¹Ilmu Komunikasi, Universitas Dian Nusantara, Jakarta Barat, Indonesia

²Communication Lead at Briefer, Jakarta, Indonesia

³Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang Selatan, Indonesia

algooth.putranto@dosen.undira.ac.id, celixa@briefer.id, arsa.widitiarsa@umn.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 mempercepat peralihan menuju kerja jarak jauh dan fleksibel secara global, mendorong pertumbuhan pekerjaan platform dalam industri komunikasi Indonesia. Pemahaman terhadap ekosistem kerja platform menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan peluang bagi pekerja lepas serta menjawab kebutuhan industri. Penelitian ini menganalisis pertumbuhan pekerjaan platform pada sektor komunikasi Indonesia dengan menekankan pengalaman pekerja lepas yang memanfaatkan platform digital. Pendekatan kualitatif digunakan dengan *snowball sampling* yang dipilih karena memberikan akses efektif pada komunitas pekerja lepas yang sulit dijangkau. Partisipan awal dipilih berdasarkan keterlibatan aktif minimal satu tahun dalam pekerjaan lepas komunikasi, kemudian merekomendasikan responden lain dengan karakteristik serupa. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik dan laporan industri. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola pengalaman, tantangan, dan peluang yang muncul. Temuan menunjukkan bahwa pekerjaan platform mendemokratisasi akses kerja, namun menghadapi hambatan berupa ketidakpastian pendapatan, keterbatasan regulasi, dan dominasi jaringan pribadi dalam memperoleh proyek. Studi ini menyarankan kebijakan tentang standar biaya layanan, perlindungan sosial, serta kolaborasi platform dengan firma komunikasi mapan untuk membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pekerjaan Platform; Pekerja Lepas; Industri Komunikasi; Ekonomi Digital

Abstract

The COVID-19 pandemic has accelerated the global transition to remote and flexible work, driving the growth of platform work within Indonesia's communication industry. Understanding the platform work ecosystem is essential to ensure sustainable opportunities for freelancers while meeting industry demands. This study analyzes the expansion of platform work in Indonesia's communication sector, emphasizing the experiences of freelancers who utilize digital platforms. A qualitative approach was employed using snowball sampling, selected for its effectiveness in accessing hard-to-reach freelance communities. Initial participants were chosen based on at least

one year of active engagement in freelance communication work and subsequently referred other respondents with similar characteristics. Primary data were collected through in-depth interviews, while secondary data were obtained from academic literature and industry reports. Thematic analysis was conducted to identify patterns of experience, challenges, and opportunities. Findings reveal that platform work has democratized access to employment but continues to face obstacles, including income insecurity, weak regulatory frameworks, and the dominance of personal networks in securing projects. This study recommends the establishment of standardized service fees, the implementation of social protection measures, and stronger collaboration between platforms and established communication firms to build an inclusive and sustainable ecosystem.

Keywords: Platform Work; Freelancers; Communication Industry; Digital Economy

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 mempercepat transisi global menuju kerja jarak jauh dan hibrida, termasuk di Indonesia. Presiden Joko Widodo pada awal pandemi mendorong kebijakan bekerja dari rumah untuk mengurangi penyebaran virus (Afif faiq & Ode, 2024). Dampaknya, terjadi penurunan 22% dalam kerja tatap muka, sementara 41% pekerja beralih pada kombinasi kerja hibrida dan 13% bekerja sepenuhnya dari rumah. (Reyes, 2024) mencatat bahwa 77% pekerja global mengadopsi model kerja hibrida, menegaskan fleksibilitas sebagai standar baru dalam hubungan kerja. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada dunia kerja, tetapi juga pada sektor ekonomi lebih luas seperti perkantoran, perumahan, transportasi, konsumsi bahan bakar, dan mobilitas perkotaan (Kang et al., 2020; De Haas et al., 2020).

Perubahan tersebut turut memengaruhi sektor komunikasi, dengan meningkatnya peran platform digital seperti Briefer, GetCraft, dan Freelancer.co.id yang mempertemukan pekerja lepas dengan klien untuk layanan penerjemahan, produksi konten, dan desain visual. Freelancer didefinisikan sebagai individu yang bekerja mandiri berbasis proyek (Pyun Jung A, 2022), berkontribusi menyediakan keterampilan fleksibel yang membantu perusahaan beradaptasi dengan dinamika pasar sekaligus menekan biaya operasional (Rhogust, 2023; Popiel, 2017). Dengan perannya, pekerja lepas tidak hanya dipandang sebagai solusi efisiensi, tetapi juga penggerak inovasi dalam ekonomi digital.

Platform kerja berbasis web juga membuka peluang baru bagi perempuan dan penyandang disabilitas, sehingga memperluas inklusi ekonomi di negara berkembang. Namun, ekosistem ini menghadapi tantangan signifikan, antara lain minimnya perlindungan hukum dan jaminan sosial (Fishman, 2020), ketidakpastian pembayaran, serta akses digital yang tidak merata. Kesenjangan regulasi semakin terlihat dengan membandingkan praktik di negara maju, misalnya California yang mengesahkan RUU AB 5 sehingga kontraktor independen memperoleh perlindungan tambahan seperti asuransi kesehatan dan cuti berbayar (Lane, 2020). Indonesia hingga kini masih menghadapi

kekosongan kerangka regulasi yang komprehensif untuk mendukung pekerja lepas di era digital.

Kajian internasional menyoroti dinamika yang membentuk ekosistem kerja platform. Vallas & Schor (2020) menekankan efisiensi globalisasi tenaga kerja melalui gig economy. Howcroft & Bergvall-Kåreborn (2019) serta Gandini (2019) menunjukkan bagaimana algoritma dan sistem umpan balik membentuk otonomi pekerja sekaligus meningkatkan kendali platform. Graham & Woodcock (2018) menambahkan bahwa meskipun digitalisasi memperluas akses pasar, jaringan personal tetap dominan dalam mendapatkan proyek, sebuah temuan yang relevan dengan konteks Indonesia. Pilatti et al., (2024) juga menegaskan pentingnya jejaring sosial untuk menyeimbangkan kendali algoritmik dalam kerja digital. Malik et al., (2021) menekankan perlunya membedakan antara ekonomi gig dan ekonomi platform untuk mengatasi tantangan regulasi dan ekonomi.

Meskipun literatur global telah membahas fleksibilitas, kendali algoritmik, dan otonomi pekerja, kajian empiris mengenai ekosistem kerja platform di Indonesia khususnya pada industri komunikasi masih jarang. Beberapa publikasi membahas gig economy secara umum, namun minim yang mengkaji aspek regulasi, keberlanjutan, dan implikasi sosial-ekonomi pada sektor spesifik komunikasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai konteks penting karena digitalisasi komunikasi berkembang pesat tetapi tidak diikuti kerangka perlindungan pekerja yang memadai.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi empiris dengan menelaah ekosistem kerja platform di industri komunikasi Indonesia. Analisis difokuskan pada pengalaman pekerja lepas, dinamika peluang dan hambatan, serta implikasi kebijakan. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi akademik melalui pengayaan literatur tentang platform work di negara berkembang, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan publik terkait standar biaya layanan, perlindungan sosial, dan kolaborasi antara platform digital dan perusahaan komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun ekosistem kerja platform yang inklusif dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam pengalaman dan perspektif pekerja lepas di industri komunikasi yang bekerja melalui platform digital. Subjek penelitian adalah pekerja lepas di sektor komunikasi dengan rentang usia 20 hingga 55 tahun, terdiri dari pria dan wanita, baik pengguna aktif platform kerja maupun non-pengguna. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik snowball sampling karena populasi pekerja lepas dalam industri komunikasi relatif sulit dijangkau secara langsung. Partisipan awal dipilih berdasarkan keterlibatan aktif minimal satu tahun dalam pekerjaan lepas komunikasi, kemudian merekomendasikan partisipan lain dengan karakteristik serupa. Pendekatan ini dianggap efektif karena memungkinkan peneliti

memperoleh akses ke komunitas pekerja lepas yang tersembunyi (hidden population) dan mengumpulkan data yang kaya dari individu dengan pengalaman langsung.

Data penelitian dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu studi pustaka dan wawancara mendalam (Zola, Fadhlurrahman, & Ardaneswhari, 2024). Studi pustaka dilakukan untuk memberikan konteks historis dan teoretis, mencakup penelitian terdahulu, laporan industri, serta literatur akademik yang relevan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sepuluh partisipan yang terdiri dari pengguna dan non-pengguna platform digital dalam bidang komunikasi. Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur (Sarifuiddin & Mahmud, 2025). Hal ini untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, serta persepsi mereka terhadap ekosistem kerja platform. Seluruh wawancara direkam, ditranskripsi, dan dianalisis secara sistematis (Noviafni, 2025).

Analisis data menggunakan pendekatan thematic analysis sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses ini dilakukan melalui beberapa tahap: membaca transkrip secara berulang untuk memahami konteks, melakukan open coding untuk mengidentifikasi unit data yang relevan, mengelompokkan kode ke dalam kategori, menyusun kategori menjadi tema utama, serta menafsirkan tema dalam kerangka literatur gig economy dan studi tentang pekerjaan platform (Aisyah & Suratnoaji, 2025). Seluruh data primer dan sekunder ditinjau secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta perbedaan yang muncul, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman pekerja lepas di industri komunikasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pemahaman ekosistem pekerjaan platform di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pekerja Lepas di Industri Komunikasi Digital

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023), terdapat sekitar 46,47 juta pekerja lepas di Indonesia, atau 32% dari total angkatan kerja. Jumlah ini mencerminkan tingginya partisipasi dalam sektor informal, termasuk pekerjaan digital berbasis platform.

Tabel 1. Daftar Responden

No	Nama & Domisili	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Pengguna Platform Kerja
1	Irin, Jakarta	30	Content Creator	Ya
2	Eka, Malang	21	Content Writer	Ya
3	Julia, Jakarta	26	Copywriter, Social Media Specialist & Content Creator	Ya
4	Mita, Tangerang	30	Social Media	Ya
5	Merry, Bali	29	Public Relations	Ya

No	Nama & Domisili	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Pengguna Platform Kerja
6	Gaby, Jakarta	32	Creative Writer & Social Media Specialist	Tidak
7	Adel, Malang	21	Content Writer Editor and	Tidak
8	Rochimawati, Jakarta	51	Communication Consultant	Tidak
9	Faizal, Jakarta	41	Social Media Content	Tidak
10	Nurul, Jakarta	27	Media Relations	Tidak

Tabel 1 menunjukkan profil sepuluh pekerja lepas yang menjadi responden penelitian ini. Keseluruhan responden berasal dari industri komunikasi seperti content writer, public relations, editor, hingga social media specialist. Enam dari mereka aktif menggunakan platform kerja digital seperti Upwork, Fiverr, Briefer, dan lainnya.

“Saya bisa kerja di mana saja, kapan saja. Gak harus duduk di kantor jam 9 sampai 5. Saya bisa atur ritme sendiri,” (*Irin, 30 tahun, Jakarta*). Kutipan ini mencerminkan semangat *gig economy* yang menekankan fleksibilitas waktu dan lokasi. Menurut (De Stefano, 2015), model kerja ini menunjukkan relasi kerja yang lebih cair dan berfokus pada proyek. Hal ini juga ditegaskan oleh (Wood, Graham, Lehdonvirta, & Hjorth, 2019) bahwa pekerja lepas digital memiliki kontrol tinggi atas waktu kerja mereka namun menghadapi ketidakpastian pendapatan dan jam kerja.

Karakteristik dan Motivasi Pekerja Lepas

Mayoritas responden menyebut fleksibilitas dan *multiple income stream* sebagai motivasi utama. Beberapa menjadi pekerja lepas penuh waktu, lainnya menjadikannya kerja sampingan.

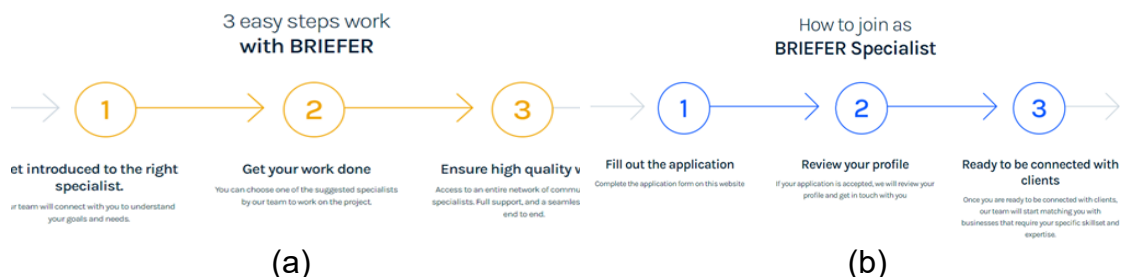
“Kalau freelance itu saya bisa pilih klien, gak harus ikut sistem kantor,” (*Faizal, 41 tahun, Jakarta*).

Fenomena ini sesuai dengan konsep *portfolio career*, di mana pekerja mengelola berbagai proyek sesuai minat dan kompetensinya (Haapakorpi, 2022). Berdasarkan penelitian oleh (Wood et al., 2019), pekerja lepas digital lebih memilih fleksibilitas meski mengorbankan kestabilan kerja.

Pola Kerja dan Interaksi di Platform Digital

Gambar 1 menggambarkan mekanisme platform Briefer dari posting proyek hingga eksekusi oleh freelancer. Lima responden menyebut platform memudahkan proses pencarian kerja, namun tiga lainnya menyatakan platform sepi klien.

“Platform-nya sepi, gak ada klien. Jadi saya lebih mengandalkan relasi pribadi,” (*Merry, 29 tahun, Bali*).



(a) (b)
 Sumber: <https://briefer.id/how-it-works>, 2024
 Gambar 1. (a) Klien; (b) Langkah-Langkah Bekerja Dengan BRIEFER

Kondisi ini mengonfirmasi temuan (De Reuver, Sørensen, & Basole, 2018) bahwa dalam *digital labor ecosystem*, infrastruktur digital hanya efektif bila ditopang reputasi dan jaringan sosial. Faktor sosial dan modal budaya memainkan peran penting dalam keberhasilan pekerja lepas digital.

Mendukung konsep di atas, kelima responden berbagi pengalaman mereka dalam menggunakan platform kerja seperti Social Buzz, Fiverr, Project.co, Upwork, dan Fastwork. Terdapat 3 temuan seperti:

- Platform ini dapat memudahkan klien untuk berbagi proyek, sementara pekerja lepas menghubungi klien melalui penawaran proyek. Pekerja lepas juga harus memiliki profil yang komprehensif untuk meningkatkan visibilitas mereka di halaman situs web.
- Platform ini hanya berfungsi sebagai penyedia kumpulan bakat tempat klien menemukan bakat atau spesialis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita bisa melihatnya sebagai proses bisnis pasif bagi para pekerja lepas.
- Platform ini kurang diminati oleh klien sehingga membuat para freelancer tidak pernah mendapatkan proyek dari platform tersebut sehingga para freelancer merasa bahwa bekerja pada platform tersebut tidak memberikan keuntungan apa pun bagi mereka.

Manfaat Ekonomi dan Sosial Platform Work

Platform Work menyediakan peluang fleksibel untuk mendapatkan penghasilan, yang menurut responden yang menggunakan platform Work memiliki transparansi yang baik dalam proses pembayaran. Platform Work juga menampilkan biaya dari klien sebelum memulai proyek agar para pekerja lepas dapat mempertimbangkannya. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan ketidaknyamanan selama proses kerja.

Platform kerja memungkinkan transparansi pembayaran dan negosiasi harga di awal. Lima responden merasa terbantu dalam menetapkan ekspektasi. "Saya jadi terus upgrade skill karena tuntutan proyek beda-beda," (*Julia, 26 tahun, Jakarta*).

Menurut (Pulignano, Muszyński, & Tapia, 2025; Strebkov, 2023), kerja platform memperluas peluang portofolio dan peningkatan keterampilan mandiri. Namun, tidak adanya perlindungan sosial formal menyebabkan kerentanan struktural, khususnya di negara berkembang.

Pekerjaan platform membantu banyak pekerja platform mencapai keamanan ekonomi dan kontrol yang lebih besar atas jam kerja mereka, mengembangkan keterampilan, meningkatkan reputasi mereka, dan menikmati pekerjaan mereka (World Economic Forum, 2020). Namun, banyak platform masih bingung. Hal ini penting untuk diingat ketika mempertimbangkan manfaat perusahaan platform bagi pekerja dari perspektif kesempatan kerja dan pendapatan tambahan (World Economic Forum, 2020). Memiliki sistem yang menguntungkan kedua belah pihak dan memperluas permintaan klien adalah pekerjaan rumah Platform Work untuk menjaga bisnis tetap relevan dengan industri komunikasi.

Strategi Bertahan dalam Ekosistem Freelance

Responden aktif memperbarui portofolio, mengembangkan jejaring, dan menjaga relasi dengan klien lama. Mereka mengandalkan reputasi pribadi sebagai modal sosial. Hal ini menguatkan temuan (Mateus, Rincón, & Hinestroza, 2024; Zhan, Wang, & Bi, 2025) bahwa di sektor kreatif digital, keberhasilan lebih ditentukan oleh efek jaringan dan rating klien daripada kualitas portofolio semata. Rekomendasi informal dan koneksi menjadi saluran utama akuisisi proyek.

Responden menyebutkan bahwa platform kerja di Indonesia harus berkolaborasi dengan konsultan komunikasi yang mapan atau terkemuka untuk menarik klien menggunakan platform tersebut. Perilaku bisnis di Indonesia mungkin berbeda dengan negara lain di mana platform kerja bukan platform utama untuk mencari talenta dalam kolaborasi proyek. Memahami situasi ini, Platform Work di Indonesia dapat mengadaptasi model Efek Jaringan (World Economic Forum, 2020) untuk memperluas skala ekonomi sisi penawaran. Semakin banyak pekerja lepas yang aktif di platform, semakin menarik bagi konsumen untuk menggunakan layanan tersebut, pada gilirannya, basis konsumen yang berkembang akan menarik lebih banyak pekerja. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi dasar bagi firma konsultan komunikasi untuk merekomendasikan pekerja lepas aktif kepada klien. Misalnya, semakin banyak klien yang menggunakan platform melalui kolaborasi dengan konsultan atau firma komunikasi, semakin banyak pekerja lepas yang terhubung dengan mereka untuk menemukan proyek spesifik yang sesuai dengan spesialisasi mereka. Hal ini pada gilirannya berarti lebih banyak bisnis bagi pekerja lepas, dan peningkatan pendapatan. Namun, wawasan dari World Economic Forum menunjukkan bahwa memaksimalkan efek jaringan dapat menyebabkan Platform Work berupaya untuk berekspansi hingga mendominasi suatu lokasi atau sektor (World Economic Forum, 2023).

Tantangan dan Rekomendasi untuk Kebijakan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pekerja lepas dalam ekosistem kerja digital adalah ketiadaan standarisasi biaya jasa dan kontrak kerja formal. Banyak responden mengungkapkan bahwa kerja sama dilakukan secara

informal tanpa kontrak yang jelas, sehingga menempatkan mereka pada posisi tawar yang lemah. Padahal, regulasi seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebenarnya dapat menjadi acuan, meskipun implementasinya belum menjangkau kerja digital secara spesifik. Di sisi lain, ketidakpastian pembayaran menjadi isu serius, terutama bagi mereka yang bekerja di luar sistem platform. Tiga responden menyebut pernah mengalami keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Seperti yang disampaikan oleh Adel (21 tahun, Malang), *"Sempat klien kabur padahal kerjaan udah selesai. Gak ada jaminan."* Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum atas hak-hak pekerja lepas dalam hubungan kerja non-formal.

Tantangan berikutnya adalah minimnya perlindungan hukum dan sosial. Sebagian besar responden tidak mendapatkan akses terhadap asuransi kerja, jaminan hari tua, atau skema perlindungan sosial lainnya. (ILO, 2021) menegaskan bahwa pekerja platform berada dalam wilayah hukum yang abu-abu (*grey zone*), di mana status ketenagakerjaan mereka tidak diakui secara eksplisit dalam regulasi yang ada. Masalah lainnya terkait dengan kesenjangan geografis dan inklusi kerja. Keragaman geografis ini menimbulkan tantangan bagi regulasi, tetapi juga berarti peluang bagi diskusi tingkat nasional untuk belajar dari praktik baik di tempat lain. Platform Work seperti Upwork, Fiverr, BRIEFER, dan Fastwork dapat menjadi bagian dari solusi untuk tantangan tersebut, termasuk bagaimana menyediakan lapangan kerja bagi komunitas terpinggirkan, terutama mereka yang berada di luar pusat kota yang berkembang pesat, dan bagaimana menempatkan kembali jutaan pekerja yang pekerjaannya mungkin hilang karena otomatisasi ke peran baru.

Jakarta bukanlah pusat pekerja paruh waktu di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik 2023 menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi pada Februari 2023 yaitu Provinsi Papua (43,94 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (37,43 persen), dan Provinsi Jambi (37,10 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada Februari 2023 adalah Provinsi Kepulauan Riau (14,68 persen), DKI Jakarta (15,18 persen), dan Banten (18,31 persen). Pekerja paruh waktu tertinggi berada di wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, yang mencerminkan ketimpangan akses terhadap peluang kerja digital. Dengan demikian, dibutuhkan intervensi kebijakan yang berpihak dan integratif untuk menjembatani kesenjangan ini serta memastikan bahwa kerja digital benar-benar bersifat inklusif dan berkeadilan.

Adanya tantangan tersebut, responden menyarankan beberapa peluang bagi para pembuat kebijakan untuk mengatasinya:

1. Pengaturan biaya layanan dan standar kompetensi untuk industri komunikasi
Pekerja Lepas diatur dalam Peraturan 10 PP No. 35 Tahun 2021. Perjanjian kerja lepas, yang disebut 'PKWT', diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang jenis dan sifat atau kegiatannya tidak tetap, tidak pasti dalam hal waktu dan volume pekerjaan, dan pembayaran upah pekerja yang berbasis kehadiran.

2. Para pembuat kebijakan harus dapat membantu menentukan biaya standar untuk layanan pekerja lepas yang menyesuaikan tarif layanan, jam kerja, latar belakang pendidikan, dan kompetensi untuk menciptakan ekosistem yang lebih profesional yang menguntungkan bagi bisnis dan pekerja lepas.
3. Perlindungan tenaga kerja untuk pekerja lepas. Pekerja platform dan pekerja lepas seringkali diklasifikasikan sebagai kontraktor independen, yang berarti mereka tidak memiliki jaring pengaman yang sama dengan karyawan bergaji, undang-undang perlindungan sosial, atau hak-hak tertentu atas jaminan ketenagakerjaan tertentu (kontrak kerja, hari libur, tunjangan sakit, asuransi pengangguran, dan pensiun) (ILO, 2023).
4. Setiap pekerja, termasuk pekerja lepas, berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus menetapkan kebijakan pengupahan dan perlindungan yang mencakup upah minimum dan skalanya, upah lembur, bentuk dan metode pembayaran upah, serta kontrak kerja bagi pekerja lepas.
5. Pembayaran yang andal. Selain standar biaya layanan, klien atau perusahaan perlu meningkatkan perilaku bisnis agar lebih tepat waktu dalam proses pembayaran dan ruang lingkup pekerjaan yang jelas melalui kontrak resmi. Pekerja lepas berhak untuk menerima pembayaran tepat waktu berdasarkan perjanjian kontrak setelah tugas selesai.
6. Platform Work dapat menyediakan pembayaran dan kontrak kerja yang cepat dan andal melalui platform, beserta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan penipuan yang bermanfaat bagi pekerja lepas (World Economic Forum, 2020).
7. Inklusivitas, kerja platform dapat mengurangi hambatan masuk di sektor-sektor tertentu, dan untuk bagian-bagian tertentu dari tenaga kerja, serta menyediakan lebih banyak spesialisasi sektor untuk kebutuhan komunikasi seperti sektor ekonomi, sektor pertambangan, sektor keuangan, sektor gaya hidup, sektor otomotif, dan lainnya. Kerja Platform dapat menggunakan informasi tentang preferensi pekerja dan perusahaan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi proses pencocokan tenaga kerja.
8. Keragaman geografis, platform dapat memfasilitasi distribusi peluang geografis yang lebih seimbang bagi pekerja, baik secara global maupun di dalam negara, dengan menciptakan lebih banyak peluang untuk bekerja jarak jauh dan membawa pekerjaan serta layanan kepada komunitas yang terpinggirkan (World Economic Forum, 2020).

Peran Strategis Platform Work dalam Ekosistem Komunikasi

Platform digital dapat menjadi solusi kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja di wilayah marginal. Namun, tanpa sistem dukungan seperti pelatihan, sertifikasi, dan perlindungan sosial, inklusi hanya bersifat semu. Penelitian (Anggono, Wahanisa, Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari, & Adiyatma, 2025), menunjukkan bahwa platform kerja digital di Indonesia hanya optimal jika dikaitkan dengan penguatan kapasitas SDM dan kebijakan

perlindungan pekerja. Dalam konteks ini, platform perlu dilihat bukan sekadar teknologi, melainkan bagian dari ekosistem ketenagakerjaan digital yang terintegrasi.

IV. KESIMPULAN

Platform kerja berbasis digital berperan penting dalam membuka peluang kerja di sektor komunikasi, terutama bagi pekerja lepas yang membutuhkan fleksibilitas dan akses lintas wilayah. Fleksibilitas waktu, otonomi kerja, serta potensi pengembangan portofolio menjadi faktor utama yang mendorong partisipasi dalam pekerjaan platform. Tantangan struktural seperti absennya kontrak formal, ketidakpastian pembayaran, dan minimnya perlindungan sosial menjadi hambatan utama dalam penguatan ekosistem kerja digital. Kebijakan yang mendukung dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem kerja platform yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi awal terhadap pemahaman kerja platform di Indonesia. Studi lanjutan dengan cakupan wilayah dan jumlah responden yang lebih luas diperlukan untuk memperkaya perspektif serta mengembangkan rekomendasi yang lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif faiq, M., & Ode, S. (2024). Tactical Steps of the Head of Sunter Jaya's Leadership Style in Facing the COVID-19 Pandemic. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–11.
- Aisyah, E., & Suratnoaji, C. (2025). Analisis Framing Pemilu 2024 Dalam Film Dokumenter "Dirty Vote" Framing Analysis of the 2024 Election in the Documentary Film "Dirty Vote." *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4, 2025.
- Anggono, B. D., Wahanisa, R., Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari, A. P., & Adiyatma, S. E. (2025). Interrogating the Legal Foundations of Digital Transformation: Balancing Economic Growth and Social Welfare in the Era of Disruption. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 8(1), 191–211. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12211>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2023/06/16/ddcaf3b4a35c8be03f8c7ac5/i/ndikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2023.html>
- De Haas, M., Faber, R., & Hamersma, M. (2020). How COVID-19 and the Dutch 'intelligent lockdown' change activities, work and travel behaviour: Evidence from longitudinal data in the Netherlands. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 6, 100150.
- De Reuver, M., Sørensen, C., & Basole, R. C. (2018). The digital platform: a research agenda. *Journal of Information Technology*, 33(2), 124–135.
- De Stefano, V. (2015). The rise of the just-in-time workforce: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the gig-economy. *Comp. Lab. L. & Pol'y*

- J., 37, 471.
- Fishman, S. (2020). *Working with independent contractors*. Nolo.
- Gandini, A. (2019). Labour process theory and the gig economy. *Human Relations*, 72(6), 1039–1056.
- Graham, M., & Woodcock, J. (2018). Towards a fairer platform economy: introducing the Fairwork Foundation. *Alternate Routes*, 29.
- Haapakorpi, A. (2022). The quality of a professional portfolio career in the post-industrial era. *Journal of Education and Work*, 35(4), 441–454. <https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2073340>
- Howcroft, D., & Bergvall-Kåreborn, B. (2019). A typology of crowdwork platforms. *Work, Employment and Society*, 33(1), 21–38.
- ILO, I. L. O. (2021). *The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. Retrieved from <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/role-digital-labour-platforms-transforming-world-work>
- ILO, I. L. O. (2023). *Providing adequate and sustainable social protection for workers in the gig and platform economy: Technical paper prepared for the 1st meeting of the Employment Working Group under the Indian presidency*. (February), 2–4. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ddgreports/---ddg_p/documents/publication/wcms_867536.pdf
- Kang, M., Choi, Y., Kim, J., Lee, K. O., Lee, S., Park, I. K., ... Seo, I. (2020). COVID-19 impact on city and region: what's next after lockdown? *International Journal of Urban Sciences*, 24(3), 297–315.
- Lane, M. (2020). *Regulating platform work in the digital age*. 1–29. Retrieved from https://goingdigital.oecd.org/data/notes/No1_ToolkitNote_PlatformWork.pdf
- Malik, R., Visvizi, A., & Skrzek-Lubasińska, M. (2021). The gig economy: Current issues, the debate, and the new avenues of research. *Sustainability*, 13(9), 5023.
- Mateus, M. A., Rincón, A. G., & Hineostroza, M. P. G. (2024). Predictive Variables of Organisational Performance in Creative Industry Companies from the Perspective of Managers: Experiences in SMEs. *Journal of Entrepreneurship*, 33(3), 485–516. <https://doi.org/10.1177/09713557241281799>
- Noviafni, F. N. (2025). Strategi Komunikasi Persuasif Media Sosial dalam PILKADA Sumatera Barat 2024 Persuasive Social Media Communication Strategies in the 2024 West Sumatra Regional Elections . Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Sumatera Barat 2024 merupakan mempromosikan vis. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 433–443.
- Pilatti, G. R., Pinheiro, F. L., & Montini, A. A. (2024). Systematic Literature Review on Gig Economy: Power Dynamics, Worker Autonomy, and the Role of Social Networks. *Administrative Sciences*, 14(10), 267.
- Popiel, P. (2017). “Boundaryless” in the creative economy: assessing freelancing on Upwork. *Critical Studies in Media Communication*, 34(3), 220–233.
- Pulignano, V., Muszyński, K., & Tapia, M. (2025). Freelancing, platform work and

- precarious careers. In *Research Handbook of Careers in the Gig Economy* (pp. 167–179). <https://doi.org/10.4337/9781035318537.00018>
- Pyun Jung A. (2022). *Self-contented Young Freelancers, What Values do they Pursue?*
- Reyes, R. R. M. (2024). Pekerjaan hibrida: Dari “baru” ke “sekarang” normal. Retrieved from PwC website: <https://www.pwc.com/ph/en/tax/tax-publications/taxwise-or-otherwise/2024/hybrid-work-from-new-to-now-normal.html>
- Rhogust, M. (2023). Labor Law Reform in the Gig Economy Era: Analysis of the Impact of Regulatory Changes on Freelancers in Indonesia. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 1(1), 48–60.
- Sarifuddin, R., & Mahmud, S. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Penanganan Tunawisma dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Implementation of Palu City Government Policy in Addressing Homelessness and Begging Based on Regional Regulation Number 3 of 2018 tun. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 785–801.
- Strebkov, D. O. (2023). Self-presentation and Success on Digital Platforms by the Example of Construction and Repair Workers. *Sotsiologicheskii Zhurnal*, 29(3), 70–92. <https://doi.org/10.19181/socjour.2023.29.3.4>
- Vallas, S., & Schor, J. B. (2020). What do platforms do? Understanding the gig economy. *Annual Review of Sociology*, 46(1), 273–294.
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75.
- World Economic Forum. (2020). *The Promise of Platform Work : Understanding the Ecosystem*. (January), 25. Retrieved from www.weforum.org
- World Economic Forum. (2023). future of Jobs Report. In *world economic forum*. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/>
- Zhan, Y., Wang, T., & Bi, X. (2025). The impact of external network embedding on the development of local online game industries. *Progress in Geography*, 44(1), 157–169. <https://doi.org/10.18306/dlkxjz.2025.01.012>
- Zola, G., Fadhlurrahman, M. D., & Ardaneshwari, N. I. (2024). Mengungkap Kepemimpinan Lurah Kalurahan Condongcatur Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 84–99. <https://doi.org/10.59713/jipik.v3i2.937>